

KINERJA PEGAWAI KELURAHAN DALAM PENYALURAN BERAS PADA PROGRAM BERAS MISKIN DI KELURAHAN KAMPAL

Jamilah

Jamilahhumas@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

Based on the results of the study, that the Employee Performance At Village In Rice Distribution Program Rice Poor in Sub Kampal not yet effective, the First; aspects of productivity, ie employees village should also pay attention to giving understanding to the RTS-PM that Raskin was a government program for low-income people, so the RTS-PM has the right to scrutinize carefully the level of achievement indicators 6T, which is on target, right quantity, price, timely, quality, and proper administration. Second; Quality of Service, Many negative view formed on the organization of the public, comes as public dissatisfaction on the quality of service received from public organizations. Unfriendly attitude kelurahan staff in providing guidance to the RTS-PM very impressed unethical. Third; Responsiveness, The Village Kampal less facilitating the existence of poor people who do not have a card which is actually more worthy Raskin of Raskin recipients today. Employees village malpractice impressed only distribute Raskin, however, other problems inherent in raskin policies are rarely reported to the district level. Thus, the researchers conclude that the Village Employee Performance In Distribution of Rice In Rice Program Poor in Sub Kampal not maximized, because only two (2) aspects are fulfilled, namely the aspect of Responsibility and Accountability. While other aspects not maximized, namely the aspect of productivity, service quality and responsiveness.

Keywords: Policies, Education, Training, and Education and Training

Adanya krisis ekonomi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak membuat kehidupan masyarakat Indonesia semakin terpuruk. Banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan meringankan beban Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan program raskin, yaitu subsidi beras bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Dalam program raskin, Lurah sebagai penanggung jawab di tingkat Kelurahan dalam pelaksanaannya, selain bertugas memantau penyelesaian pembayaran hasil penjualan beras, juga memantau administrasi distribusi raskin di wilayahnya.

Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi merupakan salah satu yang menerima program raskin dari pemerintah. tahun 2016 hanya 113 KK target Pagu Beras sebanyak 1.695(Kg). Pelaksanaan program Raskin tahun 2016 setiap

rumah tangga sasaran Penerima manfaat (RTS-PM) akan menerima beras sebanyak Rp. 156Kg/RTS-PM/tahun dengan harga tebus Rp.1.600,-/Kg netto di titik distribusi, dan akan disalurkan kepada RTS-PM sebanyak 15 Kg/bulan. Raskin langsung didistribusikandari Bulog ke Kelurahan, untuk kemudian dibagikan ke RTS-PM. Kelurahan merupakan perantara yang menghubungkan antara Perum Bulog dengan RTS-PM, dan mengenai waktu pengedropan raskin tergantung dari pihak Bulog. Masalah yang terjadi di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, RTS-PM tidak mendapatkan raskin sesuai dengan yang ada dalam Pedoman Umum Raskin, karena ada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang sebenarnya layak menerima raskin tapi tidak menjadi penerima manfaat kebijakan raskin, oleh karena itu berdasarkan kesepakatan, maka RTS-PM bersedia memberikan jatahnya sebanyak 5Kg kepada RTM tersebut.

Selama ini, kinerja aparat Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi berjalan belum optimal dalam pendistribusian raskin, dikarenakan pihak Kelurahan kurang memperhatikan kualitas layanan, banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai pegawai Kelurahan kampal karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari para pegawai, bagi masyarakat penerima beras raskin juga merasa diperlakukan dengan tidak baik disaat mengambil jatah beras. Masyarakat yang memiliki kartu bahkan merasa tidak menjadi prioritas untuk mendapatkan jatahnya, karena ada kebijakan untuk memberikan jatah 5 Kg bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki kartu, pada hal secara aturan bahwa masyarakat pemilik kartu penerima raskinlah yang mendapatkan prioritas.

Bertitik tolak dari uraian di atas, dan mengacu pada pendapat Agus Dwiyanto sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Kinerja Pegawai Kelurahan Dalam Penyaluran Beras Pada Program Beras Miskin Di Kelurahan Kampal”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sugiyono(2014: 1) mendefinisikan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*. Lokasi penelitian yang ditetapkan yaitu Kantor Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Adapun penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan setelah usulan penelitian ini diujikan dan telah mendapatkan izin penelitian dari Pascasarjana Untad Palu.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni mendeskripsikan dan menyajikan hasil penelitian secara keseluruhan dan lengkap sesuai hasil penelitian. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh langsung dari para informan dengan menggunakan bantuan pedoman wawancara. sedangkan data sekunder adalah data pendukung dari data primer, yaitu data-data bersifat dokumentasi dari objek penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dari informan Kelurahan Kampal yaitu LurahKampal, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan Penerima Manfaat Program Raskin Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumen, dan triangulasi. Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman (1984, dalam Ulber Silalahi2012:339), kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis” (Ulber Silalahi, 2012: 339).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedaaan Geografis dan Pelaksanaan Rumah Sakit

Kelurahan Kampal awalnya terbentuk berdasarkan hasil rapat/musyawarah Desa Kampal pada tanggal 1 maret 2007 yang dihadiri Camat Parigi Kapolsek Parigi, Kepala Desa Kampal dan Aparat Desa, Ketua BPD dan Anggotanya serta semua unsur masyarakat yang bersepakat secara musyawarah dan mufakat menginginkan agar desa Kampal

ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan Kampal.

Dengan itu dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2008 pada tanggal 31 Maret 2008 Tentang Perubahan Status Desa Kampal menjadi Kelurahan Kampal dengan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 39.

Kinerja Pegawai Kelurahan Dalam Penyaluran Beras Pada Program Beras Miskin Di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong

Program raskin (Pedoman Umum Raskin, 2008)¹ adalah program nasional yang bertujuan membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kecukupan kebutuhan pangan dan mengurangi beban finansial melalui penyediaan beras bersubsidi. Program ini merupakan kelanjutan program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang diluncurkan pada Juli 1998. Pada 2008, Raskin menargetkan penyediaan 2,77 juta ton beras bagi 19,1 juta rumah tangga miskin dengan total biaya subsidi Rp 7,8 triliun. Setiap rumah tangga menerima 145 kg beras selama 10 bulan dengan harga tebus Rp1.600 per kilogram di titik distribusi. Penyaluran raskin hingga titik distribusi menjadi tanggung jawab Bulog, sementara penyaluran dari titik distribusi kepada rumah tangga sasaran menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini didistribusikan secara langsung kepada desa dan kelurahan penerima raskin.

Produktivitas

Persyaratan pertama bagi kinerja birokrasi publik telah berlangsung baik dan maksimal dalam penyaluran raskin, ketika pegawai kelurahan mampu menyampaikan informasi kepada kelompok sasaran untuk mengambil dan atau mempersiapkan biaya pembelian raskin, sehingga ketika raskin tersebut telah berada di Kantor Kelurahan Kampal para kelompok sasaran dapat langsung datang untuk mengambil haknya. Produktivitas juga bisa dinilai dari cara pegawai kelurahan melayani kelompok sasaran dengan baik dan

adil karena mengingat bahwa raskin adalah program pemerintah yang sangat dekat dengan konflik baik tentang kualitas dan kuantitas raskin sampai pada pro kontra penerima raskin yang memiliki kartu dan masyarakat miskin dan layak menerima program raskin akan tetapi tidak memiliki kartu. Ketika pegawai kelurahan mampu mengerjakan dan mengatasi atau meminimalisir masalah yang ada, berarti kinerja mereka telah baik.

Kualitas Layanan

Kualitas layanan menjadi hal paling sering dibicarakan oleh publik karena layanan yang diperlihatkan oleh para pegawai birokrasi kita sangat jauh dari harapan publik itu sendiri, cerminan birokrasi yang tidak beretika seringkali kita temui menjadi topik diskusi, menjadi berita dihalam utama media cetak dan menjadi trending topic untuk dibahas di media elektronik. Fakta - fakta itu semakin menempatkan pegawai birokrasi begitu rendah dimata masyarakat. Apalagi sering kita temui di kantor-kantor pemerintah jika yang meminta dilayani itu adalah kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang rendah, seperti para penerima raskin pasti mendapatkan perlakuan yang kurang baik, akan tetapi jika yang datang adalah mereka dari kalangan pejabat, pengusaha dan kelompok masyarakat yang mapan maka perlakuan pun akan terlihat sangat istimewa.

Program raskin diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang secara langsung menggambarkan bahwa kemampuan sumberdaya manusianya juga rendah, sehingga untuk memahami atau mengikuti tata tertib yang berlaku di kantor itu sangat sulit untuk kita dapatkan karena mereka terbiasa dengan lingkungan mereka sendiri. Jadi sangat diperlukan jiwa besar para pegawai untuk memberikan pelayanan sesuai yang mereka butuhkan.

Responsivitas

Responsivitas sebagai salah satu indikator pelayanan berkaitan dengan daya tanggap pada

suatu organisasi terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan sebagaimana diatur di dalam aturan perundangan. Kinerja pegawai Kelurahan Kampal dalam mendistribusikan raskin di Kelurahan Kampal dapat dilihat dari responsivitas Kelurahan Kampal sebagai pelaksana kebijakan, penyedia/pelaksana layanan publik, sikap cepat tanggap yang dimiliki oleh para pegawai kelurahan, senantiasa terus dipelihara sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

Pada kenyataannya, keinginan mewujudkan layanan publik secara optimal, tidak dapat dijalankan dengan baik karena birokrasi tidak cukup responsif terhadap dinamika semakin menguatnya kemampuan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah perilaku dan kinerja birokrasi, sehingga birokrasi selalu mendapat pengertian yang negatif. Selain itu, penyedia layanan masih belum patuh kepada ketentuan baku yang dibuatnya sendiri dalam menjalankan tugasnya penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan seringkali tanpa adanya konsekuensi pengenaan sanksi.

Responsivitas Kinerja pegawai Kelurahan kampal dalam mendistribusikan raskin sudah cukup baik, namun terkendala oleh persoalan yang melekat pada kebijakan raskin itu sendiri. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Responsibilitas.

Kemampuan organisasi dalam melaksanakan program kerja yang peka akan sasaran dan target, serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adalah mutlak dimiliki oleh Kelurahan Kampal dalam memberikan

informasi pelayanan kepada masyarakat karena memberikan informasi adalah tanggungjawab yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelayanan.

Tanggungjawab berarti sebuah keadaan yang dapat dipercaya dan terpercayai. Definisi tersebut menunjukkan bahwa organisasi yang profesional adalah organisasi yang menampilkan kinerja secara hati-hati, tepat, terukur, dan kegiatan dilaporkan secara jujur. Rasa percaya yang dimiliki masyarakat kepada Kelurahan Kampal dapat dilihat dari sumberdaya yang bertanggung jawab dan memiliki kemampuan, serta kemauan kerja yang akhirnya menimbulkan kepercayaan dalam diri masyarakat sebagai pengguna jasa, karena kecemasan akan muncul bila masyarakat sebagai yang dilayani merasa tidak yakin bahwa pegawai Kelurahan Kampal yang melayani mereka akan bersungguh-sungguh.

Akuntabilitas.

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Akuntabilitas Kelurahan Kampal dapat didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan dalam penyaluran raskin, kepada

pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pertanggungjawaban Kelurahan Kampal adalah kepada Pemerintah Kecamatan, Kabupaten, dan kepada RTS

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dikaitkan dengan teori Agus Dwiyanto, yang terdiri dari 5 (empat) aspek, yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Kinerja Aparat Kelurahan Dalam Penyaluran Beras Pada Program Beras Miskin di Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong belum efektif dua aspek lainnya, yaitu Responsibilitas dan Akuntabilitas, dapat dikatakan sudah terpenuhi. Sedangkan aspek Produktivitas, Kualitas, Responsivitas belum terpenuhi.

Saran

1. Pihak Kelurahan tidak hanya berorientasi pada output kegiatan. yang artinya, asal raskin tersalurkan maka tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kelurahan telah selesai. Tapi Pemerintah Kelurahan juga harus memperhatikan kesesuaian pencapaian 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.
2. Pemerintah Kelurahan Kampal harus terus mengevaluasi diri dalam pemberian pelayanan kepada publik tanpa pandang bulu. Persoalan etika pegawai perlu diperbaiki ketika melayani masyarakat. Sikap ramah, melayani dengan senyum serta memberikan petunjuk dengan sopan perlu dimiliki oleh pegawai kelurahan kampal.
3. Pemerintah kelurahan harus berani melakukan perubahan data dengan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan atau Badan Pusat Statistik kabupaten Parigi Moutong, agar ada perbaikan data yang ada

sekarang. Karena salah satu sumber masalah dari kebijakan Raskin adalah persoalan data yang tidak valid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan artikel ini, penulis banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dengan penuh hormat penulis menyampaikan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. Hj. Nawawi Natsir, M.Si Ketua Tim Pembimbing dan Dr. Sitti Chaeriah Akhsan, M.Si Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis sehingga artikel ini dapat terbit.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM Press. Yogyakarta
- Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta
- Anwar Prabu Mangkunegara. 2006. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Eresco. Jakarta
- Bungin, Burhan. 2015. *Metode Penelitian Sosial*. Prenada Media Group. Jakarta
- Bernardin dan Russel. 2006. *Pinter Manajer. Aneka Pandangan Kontemporer*. Alih Bahasa Agus Maulana. Binarupa Aksara. Jakarta
- Fahmi, Irfan. 2015. *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasinya*. Alfabeta. Bandung
- Faisal, Sanafiah. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. YA3: Malang.
- Keban, Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Issu*. Grava Media. Yogyakarta
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Makmur. 2013. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. PT Refika Aditama. Bandung

- Mathis, Robert L dan John H. Jackson. 2003. *Human Resource Management*. Tenth Edition. Ohio : South-Western
- Moeheryono. 2009. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Ghalai Indonesia. Bogor
- Moleong, Lexy, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- , 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Pasolong Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung
- Patilima, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Prawirosentono, Suyadi Darwin. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. BPFE. Yogyakarta
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Pustaka Belajar. Yogyakarta
- Rivai, Veithzal. 2005. *Manajemen Sumber Daya manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- , 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Begeri Sipil*. Rafika Aditama. Bandung
- Simanjuntak, Payaman. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. FE UI. Jakarta
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM : Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi Dalam Organisasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Wibowo. 2010. *Manajemen Kinerja*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Pedoman Umum Raskin. 2015. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 tahun 2014
- Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.
- Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 10 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kabupaten Parigi Moutong
- www.setneg.go.id> index2 > id=forum.detik.com › Politik & Peristiwa › Politik › Kebijakan/Masalah dan solusi Raskin 11829/raskin-untuk-masyarakat-miskin/).
- www.tnp2k.go.id/.../beras-bersubsidi-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah-raskin/